

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil DPC PKB Kota Kudus

1. Sejarah¹

Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di bawah tekanan tren reformasi yang kuat, mulai dari diskusi terbatas, demonstrasi, demonstrasi minat istighosah, dll menandai lahirnya era baru di Indonesia. , yang kemudian dikenal sebagai Zaman Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai dibanjiri usulan warga NU di seluruh tanah air.

Usulan ke PBNU bermacam-macam, ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk partai politik, ada pula yang menyebut nama partai politik. Ada 39 nama parpol yang diajukan. Nama-nama yang paling populer adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. simbol partai politik. Elemen yang paling disarankan untuk ikon partai politik adalah gambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama yang menjadi pengurus pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan. telah menyerahkan semuanya. . Bapak Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Menanggapi saran yang diterima dari komunitas Nahdliyin, PBNU menanggapi dengan hati-hati. 27 di Situbondo menyatakan bahwa NU secara organisasional tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik yang sebenarnya. Namun sikap yang diperlihatkan PBNU tidak memuaskan keinginan warga NU, banyak pihak dan kalangan NU bahkan antusias mengumumkan pendirian partai politik untuk memenuhi aspirasi politik warga NU setempat.

Di antara mereka yang mengaku sebagai partai politik adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto

¹ Dokumen dari DPC PKB Kabupaten Kudus.

dan Partai Kebangkitan Rakyat (Perkanu) di Cirebon. Akhirnya PBNU menyelenggarakan Musyawarah Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada tanggal 3 Juni 1998. Forum ini melahirkan keputusan untuk membentuk kelompok beranggotakan lima orang yang bertugas menanggapi aspirasi warga NU. Kelompok Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Koordinator Harian Rais Suriyah/PBNU), dengan anggota KH M Dawam Anwar (Kepala Departemen Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, Bapak Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S., M.Si. (Presiden PBNU) dan Ahmad Bagdja (Sekjen PBNU). Lima orang mendapat perintah untuk menjalankan PBNU. Selain itu, untuk memperkuat posisi dan kapasitas kerja kelompok Lima ketika warga NU menginginkan partai politik meningkat, rapat harian PBNU Syuriyah dan Tanfidziyah pada 20 Juni 1998 memberikan kartu surat tugas kepada kelompok Lima. dibentuk kelompok pendukung di bawah kepemimpinan Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M., Drs .H Andi Muarli Sunrawa, H. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Dr. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Pendukung bertugas membantu Kelompok Lima dalam menginventarisasi dan mensintesis usulan parpol baru, dan membantu warga NU membentuk parpol baru yang dapat memenuhi aspirasi politiknya.

Pada tanggal 22 Juni 1998, tim Lima dan tim pendukung mengadakan pertemuan untuk mendefinisikan dan menguraikan misi mereka. Pada tanggal 26 Juni 1998, kelompok Lima dan kelompok pendukung mengadakan pengapalan di Villa La Citra Cipanas untuk mempersiapkan proyek awal pendirian partai politik. Rapat ini menghasilkan 5 draf, yaitu: Refleksi NU tentang Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Draf Pernyataan. hubungan antara agama dan politik partisan. Akhir Juni 1998, sikapnya lebih santai dan

siap menginisiasi lahirnya partai politik berbasis Ahlussunah wal Jama'ah

Keinginan Gus Dur itu diperkuat dengan dukungan dari pelanggan lain seperti KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri dan KH A. Muchith Muzadi. Nantinya, penetapan nama partai tersebut disetujui oleh musyawarah kelompok pendukung Lajnah, kelompok Lajnah, kelompok NU, kelompok pendukung dengan NU, perwakilan daerah, pesantren dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah partai tersebut berdiri, maka diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan dan keadilan.

2. Mabda Siyasi

- a. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, layak dan setara dengan negara-negara lain di dunia, serta mampu membentuk suatu pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju terwujudnya kesejahteraan umum, pendidikan bangsa, kehidupan bangsa, keadilan sosial masyarakat dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan partisipasi dalam pelaksanaannya. dari tatanan dunia
- b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan

bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

- c. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya.
- d. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-Nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-Aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma’ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemungkaran.
- e. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui

keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

- f. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
- g. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala

kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

- h. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
- i. Partai Kebangkitan Bangsa yang bercirikan humanisme keagamaan (*insaniyah diniyah*), sangat mementingkan nilai-nilai humanistik keagamaan, berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik dan menerapkan yang baru lebih baik untuk tradisionalisasi dalam gaya perjuangan untuk mengejar cara-cara yang sopan dan etis. karimah. Partai merupakan inkubator untuk mewujudkan masyarakat madani

yang aspiratif, sekaligus sarana dan wadah sekaligus wadah untuk melahirkan kembali kepemimpinan bangsa. Partai dalam kedudukan ini bermaksud untuk menyerap, mengintegrasikan, membangun, mengkomunikasikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam rangka melindungi hak-hak rakyat, menjamin terselenggaranya penyelenggaraan negara yang jujur dan adil, demokrasi.

- j. Partai Kebangkitan Bangsa ialah partai terbuka dalam arti lintas agama, suku, ras, dan antar golongan diwujudkan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan, dan kepemimpinan. yaitu menolak segala bentuk kekuasaan partai yang bertentangan dengan tujuan partai.

3. Visi dan Misi Partai PKB²

Visi dan Misi Partai PKB sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

4. Tujuan dan Usaha³

Tujuan partai PKB adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia sebagaiman dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin, material, dan spiritual.
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional dan demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

² Dokumen dari DPC PKB Kabupaten Kudus

³ Dokumen dari DPC PKB Kabupaten Kudus

Sedangkan untuk mencapai tujuannya, partai kebangkitan bangsa melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Pertama, Bidang agama

Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, Bidang Politik

Membela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membela kedaulatan rakyat, mendirikan pemerintahan yang demokratis, bersih dan amanah, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri kemerdekaan, dinamisme dan pembangunan . bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan merata

Ketiga Bidang ekonomi

Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

Keempat, Bidang Hukum

Berusaha untuk memelihara dan mengembangkan supremasi hukum yang beradab, mampu melindungi setiap orang, menegakkan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kelima, Bidang Sosial dan Budaya

Berusaha membangun kebudayaan yang maju dan modern, dengan tetap menjaga jati diri bangsa yang baik guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Keenam, Bidang Pendidikan

Berusaha Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berahlak mulia, trampil, propesional, dan kritis terhadap lingkungan sosial disekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

Ketujuh, Bidan Pertahanan

Menyadarkan seluruh warga negara akan kewajibannya untuk ikut serta dalam upaya pertahanan negara, mendorong terlaksananya hak masyarakat untuk membela diri terhadap perlakuan yang menimbulkan rasa aman, baik pada pihak individu maupun institusi masyarakat tertentu.

5. Struktur Organisasi DPC PKB Kabupaten Kudus⁴

Tabel 4.1

Susunan Pengurus Dewan Syuro DPC PKB Kudus

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Ketua	K.H. Muhamad Jazuli, S.Ag., M.H.	PONPES
2	Wakil Ketua	H. Wiyono, S.H.	TOMASY
3	Wakil Ketua	K.H. Muhammad Asnawi Hafid	PONPES
4	Wakil Ketua	KH. Mujahid Dahlan	PONPES
5	Wakil Ketua	KH Jamiin Bahauddin	PONPES
6	Wakil Ketua	Gus Khidrir	PONPES
7	Wakil Ketua	K.H. Fajar Nugroho	PONPES
8	Wakil Ketua	Dra. Hj. Noor Aini	TOMASY
9	Wakil Ketua	Hj. Sukaesi	TOMASY
10	Wakil Ketua	Hj. Nurul Isnaini	TOMASY
11	Sekretaris	Drs. H. Ilwani	FRAKSI
12	Wakil Sekretaris	H. Sutejo, S.Pd.I.	FRAKSI
13	Wakil Sekretaris	H. Sunarto, SH.,M.H	MANTAN FRAKSI
14	Wakil Sekretaris	Ali Imron, S.Ag. M.Pd	PCNU
15	Wakil	Ust. Noor Hadi,	FKDT

⁴ Dokumen dari DPC PKB Kabupaten Kudus

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
	Sekretaris	S.Pd.I.,M.Pd.I	
16	Wakil Sekretaris	Ust. Rif'an, S.Pd.I. M.Pd	BADKO TPQ
17	Wakil Sekretaris	Hj. Masroh, S.Pd	PENGUSAHA
18	Anggota	K.H. Abdul Wahid	TOMAS
19	Anggota	K.H. Sinong Muhsin	PCNU
20	Anggota	K.H. Ahmad Sudardi, S.Pd.I.	PERGUNU
21	Anggota	K. Khasani, S.Ag.	TOMASY
22	Anggota	Ust. Syufa'at, S.Pd.I.	FKDT
23	Anggota	Ust. Muhammad Idris, S.Ag.	BADKO TPQ
24	Anggota	Hj. Rofi'ah	MUBALIGHOH
25	Anggota	Hj. Maslikah	MUSLIMAT
26	Anggota	Hj. Juwariyah	MUSLIMAT
27	Anggota	Hj. Zahroh	MUSLIMAT

Tabel 4.2
Susunan Pengurus Dewan Tanfidz DPC PKB
Kudus

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Ketua	H. Mukhasiron, S.Ag.	FRAKSI
2	Wakil Ketua	K. Chirzil A'Ia, S.Pd.I.	PONPES
2	Wakil Ketua	H. Ali Ihsan, S.Ag.,M.H.	FRAKSI
3	Wakil Ketua	Amin Hidayat,M.Pd	AKTIVIS
3	Wakil Ketua	Saefudin, S.Pd.I.,M.Pd.	RMI
4	Wakil Ketua	Ahmad Nor Qodin, S.H.I M.H.	ADVOKAT
4	Wakil Ketua	Agus Aji Satrio, S.E.	EXs KPU

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
5	Wakil Ketua	Dwi Syaifullah, S.Pd.I	ANSOR
5	Wakil Ketua	Hj. Mawar Anggraini, S.Sn.	ISTRI BUPATI
6	Wakil Ketua	Hj. Noor Hidayah, S.Ag.	FATAYAT
6	Wakil Ketua	Hj. Nafis Sholihah, S.Ag	FATAYAT
7	Wakil Ketua	Hj. Umi Khulsum	MUSLIMAT
8	Sekretaris	Dr. H. Noor Hadi, S.H. MH	FRAKSI
9	Wakil Sekretaris	Muh Safi'I, S.Pd	AKTIVIS
10	Wakil Sekretaris	H. M. Abdul Bashir, S.H.I.	DPC
11	Wakil Sekretaris	H. Ahmad Khairil Badawi, S.Pd.	FRAKSI
12	Wakil Sekretaris	Abu Hasan Asyari, S I P	IPNU
13	Wakil Sekretaris	Mukhlis, M.Pd.	PERGUNU
14	Wakil Sekretaris	Khifni Nasif. M.E	RMI
15	Wakil SEkretaris	Arif Musta'in, M.Pd	ANSOR
16	Wakil Sekretaris	Moh. Syakuri, S.I.P	ANSOR
17	Wakil Sekretaris	Jumanto	BANSER
18	Wakil Sekretaris	Rahmat Hidayat, S.Pd	AKTIVIS
19	Wakil Sekretaris	Hj Lu'luul Maknun, S.Pd.	FATAYAT
20	Bendahara	Suparno, S.H.I., M.H.	ANSOR
21	Wakil	M. Fuad Amrullah, S.E.	PCNU

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR
	Bendahara		
22	Wakil Bendahara	Eka Kharisma Akbar, S.E.	PENGUSAHA
23	Wakil Bendahara	Noor Aji Yusuf, S.Pd.	PENGUSAHA
24	Wakil Bendahara	Siti Rohmah, A.Md.Keb.	FRAKSI
25	Wakil Bendahara	Khuriyah, S.Ag, S.Pd.	PERGUNU

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Strategi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik

Kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji lebih dalam tentang sistem kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Apalagi Partai PKB yang sudah mempunyai nama dalam usahanya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai sistem politik berbangsa dan bernegara. Dari pemaparan Dwi Syaifullah selaku salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti bahwasanya,

“Terkait dengan adanya kaderisasi merupakan sebuah penggodokan atau menyiapkan sumber daya manusia untuk mewakili partai politik dalam menduduki jabatan-jabatan politik. Dalam melahirkan pemimpin dan kader yang loyal serta berkualitas terhadap partai politik, maka perlu mengkaji lebih dalam tentang sistem

kaderisasi yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Apalagi Partai PKB yang sudah mempunyai nama dalam usahanya untuk mencetak para kader-kader loyal dan berkualitas serta menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai sistem politik berbangsa dan bernegara.”⁵ Kaderisasi sangat penting untuk masa depan organisasi yang lebih baik, dengan penemuan kembali organisasi yang mempersiapkan penerusnya di masa depan. Penekanan organisasi tidak boleh semata-mata pada keberlangsungan dan keberhasilan agenda yang disusun, karena suatu program kerja dapat berjalan dengan baik atau tidak tergantung siapa yang melaksanakannya.

Salah satu fungsi dari adanya kaderisasi dalam suatu organisasi Informan lain juga mengatakan kepada peneli bahwasanya,

“Salah satu fungsi dari adanya kaderisasi dalam suatu organisasi ialah untuk mendokumentasikan penilaian *forward-to-backward*. Tujuan dari penilaian ini adalah agar penerus organisasi di masa depan mengetahui kesalahan apa yang dilakukan manajemen sebelumnya. Tentunya, diharapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada pemerintahan sebelumnya tidak terulang lagi pada pemerintahan berikutnya.”⁶

Dapat disimpulkan apabila dalam suatu organisasi tidak ada kaderisasi maka individu yang nantinya menjadi seorang pemimpin baru atau anggota baru akan buta dalam berorganisasi,

⁵ Dwi Syaifullah, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

⁶ Abdul Bashir, wawancara oleh peneliti, 01 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

dikarenakan tidak adanya landasan atau pengetahuan yang diberikan secara spesifik oleh kepengurusan terdahulu mengenai organisasi tersebut. Tentunya dapat dibayangkan bagaimana masa depan organisasi tersebut apabila dipimpin oleh individu yang buta dalam berorganisasi.

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting, yaitu mencari dan mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin nasional. Untuk melaksanakan peran tersebut, partai politik dituntut memiliki proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik, serta memiliki tahapan yang terstruktur, agar nantinya tidak muncul istilah "pemimpin instan". Rahmat Hidayat yang menjadi salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan kepada peneliti bahwasanya,

“Proses rekrutmen merupakan hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.”⁷

Pada bentuk pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kudus adalah kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan DPC PKB Kota Kudus ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh

⁷ Rahmat Hidayat, wawancara oleh peneliti, 01 Maret 2022, wawancara 8, transkrip.

partai di lapangan adalah kampanye dengan mengajak masyarakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pengkaderan. Peneliti juga mendapatkan informasi dari beberapa informan salah satunya M. Malik selaku Aspri PKB Kab Kudus bahwasanya,

“Bentuk pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Kudus adalah kampanye pengenalan partai baik melalui seminar partai politik, diskusi tentang partai politik serta melakukan pengkaderan. Sasaran pengkaderan DPC PKB Kota Kudus ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah terorganisir maupun bagi yang belum terorganisir dari kelompok masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai di lapangan adalah kampanye dengan mengajak masyarakat dalam pengenalan Visi/Misi partai tersebut, Keberhasilan menarik minat masyarakat ditentukan oleh tingkat keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pengkaderan.”⁸

Dari beberapa informan yang ditunjuk oleh peneliti bahwasanya peneliti juga mendapatkan informasi dari Ulil Albab selaku Kepala Aspri Kab Kudus bahwa,

“Semua elemen organisasi harus bersikap untuk mendukung terselenggaranya program ini, pengoptimalan program pengkaderan dapat dibentuk melalui lembaga yang berfungsi sebagai fasilitator, pengkaderan partai kebangkitan bangsa menjadi hal yang sangat penting untuk

⁸ M. Malik, wawancara oleh peneliti, 27 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

dilakukan untuk merebut masa depan. Menurut Saefudin selaku Demisioner Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Kudus, pengkaderan merupakan kegiatan rutin DPC PKB Kota Kudus guna untuk mendapatkan kader-kader yang menjadi penerus pengurus dari partai itu sendiri.⁹

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Proses rekrutmen dan kaderisasi dalam demokrasi dapat diibaratkan seperti bercocok tanam untuk mendapatkan hasil yang unggul, yang juga harus diikuti dengan memilih, menanam dan mengolah bibit itu secara unggul pula. Pengkaderan merupakan proses bertahap dan terus menerus sesuai tingkatan capaian situasi dalam kebutuhan tertentu yang memungkinkan seseorang kader dapat mengembangkan potensi, akal, fisik dan moral sosialnya. Pengkaderan juga dilakukan agar menghindari terjadinya politik pragmatis serta melahirkan kader-kader yang berkualitas itulah mengapa sangat penting diadakannya pengkaderan dalam menjaga kontinuitas atau stabilitas pada partai PKB.

M Abdul Bashir yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPC PKB Kab Kudus selaku informan juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya,

“Pada saat ini sistem kaderisasi PKB telah dibangun secara berjenjang, terstruktur, dan sistematis sebagaimana yang tertuang pada pasal 98 AD/ART PKB yang berbunyi: a) Rekrutmen anggota dan pengurus partai dilakukan melalui sistem kaderisasi yang berjenjang, terstruktur dan sistematis. b) Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus

⁹ Ulil Albab, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 4, transkrip.

partai yang hendak mendapatkan promosi jabatan strategis di internal partai dan atau pemerintah. b) Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah dalam penilaian kinerja dewan pengurus partai sesuai tingkatannya.”¹⁰

M Abdul Bashir salah satu informan yang dipilih guna mendapatkan informasi terkait pendidikan DPC PKB juga mengatakan kepada peneliti bahwasanya,

“Pendidikan kader dalam DPC PKB sangat dibutuhkan. Banyak sekali unsur strategi yang dilakukan. Contohnya seperti melalui unsur perempuan bangsa, garda santri, garda gemasaba.”¹¹

Hal serupa juga dikatakan oleh Dwi Syaifullah selaku informan lainnya yang ditunjuk oleh peneliti guna melengkapi data terkait pendidikan kader dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan bahwasanya,

“Dalam pendidikan kader pertama (PKP) akan mampu menjaga kesinambungan dan mempercepat program perjuangan partai dengan mempersiapkan kelahiran kembali kepemimpinan PKB. Melalui program pendidikan bagi pemula ini, kader harus memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan partai PKB di masyarakat dan mempertahankan NKRI. Setiap kerangka kerja harus terlebih dahulu mengikuti beberapa tingkat atau tahap. pertama, mulai dari pemula, menengah hingga nanti untuk eksekutif dasar. Ada tiga tahapan model

¹⁰ Abdul Bashir, wawancara oleh peneliti, 01 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

¹¹ Abdul Bashir, wawancara oleh peneliti, 01 Maret 2022, wawancara 5, transkrip.

pengkaderan di partai PKB, yaitu: 1) Tingkat Dasar, seperti pemahaman organisasi PKB, penanaman tetrthadap loyalitas kepada partai PKB dan memantapkan desdikasi kepada partai PKB 2) Tingkat Menengah seperti meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi partai PKB, membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai dan menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi partai PKB 3) Tingkat Mahir seperti mendidik berpikir futuristik, membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasi, membidik cara berpikir sistematis dan strategis,

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pendidikan kader pertama (PKP) akan mampu menjaga kesinambungan dan mempercepat program perjuangan partai dengan mempersiapkan kelahiran kembali kepemimpinan PKB. Melalui program pendidikan bagi pemula ini, kader harus memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan partai PKB di masyarakat dan mempertahankan NKRI. Setiap kerangka kerja harus terlebih dahulu mengikuti beberapa tingkat atau tahap. pertama, mulai dari pemula, menengah hingga nanti untuk eksekutif dasar. Ada tiga tahapan model pengkaderan di partai PKB, yaitu:

- a) Tingkat Dasar, yang dimana pada tingkat dasar ini adanya jenjang pendidikan gunanya untuk pemahaman arti berorganisasi, menanamkan loyalitas terhadap organisasi, memantapkan dedikasi.
- b) Tingkat Menengah, adanya pendidikan diarahkan guna membuka wawasan

berpikir yang berdasar ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi.

- c) Tingkat Mahir, adanya pendidikan guna membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik cara berpikir sistematis dan strategis, membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-peristiwa politik dan cara mengantisipasinya, mendidik berpikir futuristik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik

Tekait dengan faktor pendukung dan penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik peneliti sudah mewawancarai beberapa informan pilihan dalam penelitian ini. Khifni Nasif selaku informan mengatakan kepada peneliti bahwa,

“Peningkatan kualitas partai politik mendesak dilakukan. Sebab, partai politik memiliki tugas mencetak kader-kader berkualitas. Akan tetapi pada setiap kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun lembaga biasanya akan memperoleh dukungan dari masyarakat atau bahkan akan mendapatkan tentangan dari masyarakat, telah disinggung dibagian bab sebelumnya tujuan, isi atau materi dan metode pengkaderan itu harus sejajar dengan pembaharuan terhadap setruktur-setruktur partai politik dan struktur kemasyarakatan. Tegasnya pengkaderan itu tidak hanya diarahkan pada perubahan

politik individu saja akan tetapi juga diarahkan pada pembaharuan bentuk-bentuk kualitas struktur politik dan lembaga masyarakat.”¹²

a. Faktor Pendukung

Pada bab ini Dwi Syaifullah selaku informan yang dipilih oleh peneliti guna mendapatkan informasi terkait faktor pendukung dalam strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik selaku narasumber/informan mengatakan kepada peneliti bahwasanya,

“Faktor pendukung strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik yang *pertama* ada gaya kepemimpinannya, yang dimana dalam mengarahkan ada ketegasan, sistem yang baik maka akan menakdikan DPK PKB semakin berjaya maka hal tersebut akan menjadikan faktor pendukung. *kedua* rekrutmen kader dan kaderisasi, jika adanya rekrutmen kader dan kaderisasi sesuai standar yang baik maka akan menjadikan faktor pendukung bagi DPC PKB, *ketiga* mempunyai relasi dengan rakyat, dengan mengikuti organisasi-organisasi yang diikuti anggota DPC PKB sperti Ippnu-Ippnu dll maka akan memepterat hubungan mereka dengan rakyat. *keempat* adanya pendanaaan jika dalam organisasi ada pendanaan

¹² Khifni Nasif, wawancara oleh peneliti, 27 Februari 2022, wawancara 1, transkrip.

dari atasan maka akan menjadikan faktor pendukung bagi DPC PKB dan *kelima* wadah perjuangan, seperti organisasi-organisasi DPC PKB yang dibuat sebagai wadah untuk mencetak kader yang berkualitas dalam berpolitik.”¹³

Hal serupa juga dikatakan oleh M. Malik selaku informan/narasumber yang dijadikan pilihan peneliti untuk diwawancarai bahwasanya,

“Faktor pendukung dalam strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik yang pertama mempunyai relasi dengan rakyat, gaya kepemimpinan dari ketua partai PKB dan adanya rekrutmen kaderisasi.”¹⁴

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya yang menjadi faktor pendukung strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik adalah 1) **Gaya kepemimpinan**, jika kepemimpinan dari ketua PKB baik maka akan menjadikan faktor pendukung terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik. 2) **Rekrutmen kader**, jika pelaksanaanya dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk sekaligus menjadi faktor pendukung bagi praktek demokrasi yang baik pada suatu

¹³ Dwi Syaifullah, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁴ M. Malik, wawancara oleh peneliti, 27 Februari 2022, wawancara 2, transkrip.

negara apalagi di kota Kudus 3) **Mempunyai relasi dengan masyarakat atau rakyat**, jika para elit dan anggota DPCPKB Kabupaten Kudus mempunyai relasi yang bagus dengan masyarakat maka akan menjadikan faktor pendukung. 4) **adanya pendanaan**, jika dana yang dikeluarkan bisa dimanaj dan digunakan dengan baik maka akan menjadikan faktor pendukung juga bagi strategi kaderisasi DPC Kabupaten Kudus.

b. Faktor Penghambat

Pada bab ini pula Dwi Syaifullah selaku informan yang dipilih oleh peneliti guna mendapatkan informasi terkait faktor penghambat dalam strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik selaku narasumber/informan mengatakan kepada peneliti bahwasanya

“Faktor penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik yang *pertama* gaya kepemimpinannya, *kedua* pengendalian kader dalam berpolitik dan ketiga, pengelolaan manajemen parpol belum berdasarkan planning, organizing, actuatingactuating, controlling.¹⁵

Sama halnya yang dikatakan oleh Suparno terkait faktor penghambat, bahwasanya informan mengatakan kepada peneliti,

“Faktor penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten

¹⁵ Dwi Syaifullah, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik pertama, ada cara memimpin kedua, pengelolaan manajemen parpol yang kurang baik ketiga, kurangnya pengendalian kader dalam berpolitik.”¹⁶

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasanya yang menjadi faktor penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik adalah gaya kepemimpinan, pengendalian kader dalam berpolitik dan pengelolaan manajemen parpol belum berdasarkan *planning, organizing, actuating, controlling*. Faktor penghambat ini kebalikannya dari faktor pendukung yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas.

C. Analisis Data Penelitian

1. Strategi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik

Strategi diimplementasikan dalam bentuk perencanaan skala besar dalam arti mencakup seluruh elemen dalam organisasi yang digambarkan sebagai rencana strategis (Restra) yang diterjemahkan ke dalam rencana operasional (Renop). , yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda tahunan dan proyek, adalah kegiatan reflektif, dialami sebagai proses terpadu yang pada akhirnya membentuk karakter.¹⁷

Partai politik PKB adalah lembaga penegak modern. Merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Sebagai

¹⁶ Suparno, wawancara oleh peneliti, 02 Maret 2022, wawancara 9, transkrip.

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2008), 397

institusi politik, PKB bukanlah sesuatu yang ada secara alami, dengan anggapan bahwa dengan membuka platform organisasi, mereka dapat menyatukan orang-orang yang berpikiran sama. Dalam literatur ilmiah partai politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa strategi, seperti seperti: strategi komunikasi politik, strategi sosialisasi politik, strategi rekrutmen politik, dan strategi regulasi politik. konflik.¹⁸

Partai politik PKB sebagai organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berwawasan kebangsaan. Pemimpin yang berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika mereka menjadi pemimpin, mereka tidak dilahirkan sendiri. Proses pendidikan, baik formal maupun informal, diperlukan untuk pembentukan jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politik pada akhirnya bertanggung jawab atas output. menghasilkan pemimpin yang berkualitas seperti KH. Ma'ruf Amin.¹⁹

Selain rekrutmen, dalam organisasi parpol PKB perlu mengembangkan sistem pendidikan dan kader politik. Sistem regeneratif ini penting mengingat perlunya transfer ilmu politik, tidak hanya mengenai sejarah, visi, misi dan strategi partai politik, tetapi juga isu-isu lainnya. . Dalam sistem kader partai politik PKB, keterampilan dan keahlian politik juga dapat ditransfer. Tugas utama yang dilakukan oleh PKB sendiri dalam hal ini adalah menghasilkan calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan “melawan” partai lain melalui mekanisme pemilu. Kemampuan calon pemimpin untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat luas merupakan aset berharga partai

¹⁸ M. Badawi, wawancara oleh peneliti, 01 Maret 2022, wawancara 6, transkrip.

¹⁹ M Mukhasiron, wawancara oleh peneliti, 01 Maret 2022, wawancara 7, transkrip

politik. Orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu diberdayakan.

Dalam mencetak kader yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi dan berwawasan nasional. Kader berkualitas ini tidak hanya berorientasikan pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, secara otomatis pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan dibentuk dalam pendidikan formal dan non-formal sehingga membentuk sebuah karakter kepemimpinan dan ini adalah tugas partai politik PKB sebagai pencetak kader pemimpin bangsa.

Rekrutmen dan kaderisasi politik ini mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.²⁰ Rekrutmen politik atau representasi politik memang peranan penting dalam sistem politik suatu negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga yang ada, oleh karenanya tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politiknya.²¹ Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai tersebut. Melaksanakan fungsinya salah satu fungsi terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen PKB itu sendiri bertujuan untuk menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk ditempatkan di lembaga-lembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD.

²⁰ Ainur Rafieq, "Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009", *Journal Governance* Vol 1, No 2 (2011): 75-76.

²¹ Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi* (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003), 189-190

Kaderasi sebagai sistem terpenting bagi partai politik, sebagai pentransferan ilmu (knowledge) politik, tidak hanya yang terkait dengan visi, misi, dan strategi partai politiknya. Tetapi juga melibatkan hal-hal yang oterkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dimana pemimpin di bentuk di dalam tahapan ini.. Setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, partai politik PKB dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.

Fungsi kaderisasi atau pencetakan calon pemimpin tidak terlepas dari penanaman etika-etika politik. Dengan adanya strategi kaderisasi PKB merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen dan penguatan terhadap ideologi politik. Proses kaderisasi sebagai penguatan kelembagaan partai merupakan sebuah orientasi jangka panjang. Sehingga proses kaderisasi tersebut harus secara terus menerus dilakukan agar peningkatan kualitas kader meningkat.

Dalam pendidikan kader pertama (PKP) akan mampu menjaga kesinambungan dan mempercepat program perjuangan partai dengan mempersiapkan kelahiran kembali kepemimpinan PKB. Melalui program pendidikan bagi pemula ini, kader harus memiliki semangat yang besar untuk mengembangkan partai PKB di masyarakat dan mempertahankan NKRI. Setiap kerangka kerja harus terlebih dahulu mengikuti beberapa tingkat atau tahap. pertama, mulai dari pemula, menengah hingga nanti untuk eksekutif dasar. Ada tiga tahapan model pengkaderan di partai PKB, yaitu.²²

a. Tingkat Dasar

Pada jenjang ini pendidikan dikhususkan untuk: pemahaman arti berorganisasi, menanamkan loyalitas terhadap

²² Suparno, wawancara oleh peneliti, 02 Maret 2022, wawancara 9, transkrip.

organisasi, memantapkan dedikasi. Kader dasar adalah jenjang pengkaderan yang pertama dilakukan PKB, untuk mengikuti pengkaderan dasar seseorang tidak mesti harus menjadi anggota partai terlebih dahulu maksudnya seseorang tidak harus terdaftar sebagai anggota atau memiliki kartu anggota terlebih dahulu asalkan bersedia mengikuti rangkaian pengkaderan tingkat dasar sampai kegiatan berakhir.

b. Tingkat Menengah

Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk: membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi partai, menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi, meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi

c. Tingkat Mahir

Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk: membentuk sumber insani organisasi yang memiliki kemampuan konseptual, membidik cara berpikir sistematis dan strategis, membidik agar memiliki kemampuan menganalisis peristiwa-preistiwa politik dan cara mengantisipasinya, mendidik berpikir futuristik.

Dengan adanya pelatihan kader matri yang diberikan berupa mengenai teori-teori kepemimpinan. Dikarenakan dengan adanya pelatihan ini kaderisasi tingkat lanjut bukan saja untuk para kader PKB akan tetapi juga dri elit partai itu sendiri Dengan pelatihan ini, jenjang diperuntukkan bagi calon-calon politisi DPC PKB Kota Kudus.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik

Dapat dialanalisa oleh peneliti bahwa faktor pendukung adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang,

membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya sesuatu. Sedangkan faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.

Pertama ada gaya kepemimpinannya, gaya kepemimpinan merupakan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mengarahkan para bawahannya guna menyatukan tujuan organisasi dengan karyawan demi mencapai tujuan bersama. Jika ketua DPC PKB Kabupaten Kudus mempunyai gaya kepemimpinan yang baik itu akan menjadikan faktor pendukung bagi kualitas kader dalam berpolitik.²³

Kedua rekrutmen kader dan kaderisasi, fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang dimiliki partai PKB jika dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk sekaligus menjadi faktor pendukung bagi praktek demokrasi yang baik pada suatu negara apalagi di kota Kudus.²⁴

Ketiga mempunyai relasi dengan rakyat, sebagian besar relasi pasti memiliki visi yang sama. Tetapi dalam penyikapannya tentu berbeda-beda. Sebagai fitrah manusia, perbedaan harus didudukkan sebagai anugerah yang perlu disyukuri dan dipahami. Membangun relasi adalah sebuah kewajiban. Karena lagi-lagi manusia tidak bisa berdiri sendiri. Karena perbedaan itu memiliki fungsi untuk saling melengkapi satu sama lain.

²³ Marfuah, dkk, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Loyalitas Karyawan (Studi Kasus Hotel Olgaria Pekanbaru), *JOM FISIP* Vol. 2 No. 2, 2015, 5

²⁴ Dwi Syaifullah, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

Oleh karenanya, relasi yang dibangun perlu dijaga dengan baik. Penelitian ini merujuk pada relasi dari DPC PKB dengan masyarakat kota Kudus. Jika dalam menjalin silaturahmi baik maka akan menjadikan faktor pendukung dalam menciptakan kualitas kader dalam berpolitik.²⁵

Keempat adanya pendanaan, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk menyongsong pemilu, tapi juga untuk memutar roda organisasi partai, baik untuk kegiatan operasional maupun untuk pendidikan kader. Meskipun angkanya bisa berubah, namun sinyal ini menunjukkan adanya upaya terobosan untuk membangun kehidupan partai yang bersih dan akuntabel. Jika pendanaan lancar maka akan menjadikan faktor pendukung dalam menciptakan kualitas kader partai PKB Kabupaten Kudus untuk berpolitik.

Kelima wadah perjuangan. Wadah perjuangan disini yang dimaksudkan adalah partai PKB yang dimana menaungi kader-kader yang berkualitas untuk membangun bangsa Indonesia.²⁶

b. Faktor Penghambat

Faktor pendukung strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.

Pertama gaya kepemimpinannya, yang dimana jika gaya kepemimpinan parta PKB buruk maka akan menjadikan faktor penghambat bagi peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.

Kedua pengendalian kader dalam berpolitik, pengendalian kader ini dilakukan oleh ketua DPC PKB dalam peningkatan kualitas kader dalam berpolitik. Jika tidak ada pengendalian

²⁵ Dwi Syaifullah, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁶ Dwi Syaifullah, wawancara oleh peneliti, 28 Februari 2022, wawancara 3, transkrip.

kader maka akan menjadikan faktor penghambat bagi kualitas kader dalam berpolitik.

Ketiga, manajemen partai politik tanpa dasar 1) Perencanaan, perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan menemukan cara untuk mencapainya 2) Pengorganisasian adalah proses memastikan kebutuhan manusia dan material dari setiap sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. 3) Tindakan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik tidak ada artinya jika tidak diikuti dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi organisasi, tugas dan agenda. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali ada hal-hal khusus yang perlu disesuaikan. 4) Pengendalian, agar pekerjaan dapat berjalan sesuai visi, misi, aturan dan program kerja, diperlukan pengendalian.²⁷ Jika dalam aspek yang disebutkan lemah atau kurang baik dalam pelaksanaannya maka akan menjadi faktor penghambat bagi kualitas kader dalam berpolitik.

²⁷ Yohannes Dakhi, IMPLEMENTASI POAC TERHADAP KEGIATAN ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN TERTENTU, *Jurnal Warta*, Oktober 2016, ISSN : 1829-7463